

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Studi implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban permasalahan tentang: 1) bagaimanakah rumusan kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU, 2) bagaimanakah implementasi kebijakan tersebut, dan 3) rekomendasi apasajakah yang dapat digunakan untuk pengembangan rumusan kebijakan tersebut? Pelaksanaan penelitian dengan berbagai pendekatan, metode, dan analisis menghasilkan kesimpulan bahwa: *rumusan kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU masih kurang baik dan dalam implementasinya juga masih belum dapat terlaksana secara keseluruhan, sehingga secara umum kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU masih perlu perbaikan.* Kesimpulan tersebut secara rinci dapat ditulis sebagai berikut:

1. Rumusan kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU yang masih kurang baik atau masih perlu perbaikan meliputi rumusan komponen kebijakan:
 - a. Rumusan kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994. Komponen tujuan dan komponen organisasi metode relatif baik. Komponen materi perlu perbaikan pada sistematika dan cakupannya, serta penempatan materi IPBA secara tepat. Komponen evaluasi perlu pedoman dan format evaluasi untuk evaluasi hasil belajar dan untuk evaluasi kurikulum itu sendiri dalam implementasi.

- b. Rumusan sarana pendukung implementasi kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994. Sarana buku paket fisika (BPF) hanya baik untuk sarana belajar fisika siswa yang pandai atau tidak baik untuk siswa yang berpotensi dalam belajar fisika sedang kebawah, dengan ini rumusan BPF kurang baik untuk menunjang implementasi GBPP fisika SMU 1994. Alokasi rumusan pembelajaran dengan kegiatan demonstrasi atau kegiatan laboratorium cukup baik.
 - c. Rumusan surat keputusan pemerintah tentang lembaga-lembaga pelaksana peningkatan mutu pendidikan IPA-fisika, untuk lembaga PPPG-IPA, BPG, dan MGMP fisika sebagai lembaga pelaksana peningkatan pendidikan IPA-fisika SMU, secara umum baik, hanya belum ada rumusan tentang keterkaitan secara fungsional antar lembaga tersebut.
2. Implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU memiliki banyak kelemahan, yakni kelemahan pada:
- a. Sarana BPF dalam mendukung implementasi kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994, dari jumlah BPF, memenuhi untuk dipinjam oleh setiap siswa SMU, tetapi penggunaan atau pemanfaatan BPF dalam pembelajaran sangat kurang baik.
 - b. Sarana laboratorium fisika dalam mendukung implementasi kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994, keadaannya hanya dapat memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan minimal, dan dari sebagian kecil yang ada tersebut belum difungsikan secara optimal oleh guru fisika SMU.

- c. Guru fisika SMU dalam mendukung implementasi kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994, secara rata-rata berpotensi untuk mengajar fisika di SMU dengan baik, tetapi dalam mengajar fisika di kelas jarang yang melaksanakan pengajaran fisika di SMU sesuai dengan kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994.
 - d. Surat Keputusan (SK) Pemerintah tentang lembag-lembaga pelaksana peningkatan pendidikan IPA-fisika oleh lembaga-lembaga (PPP-G-IPA, BPG, dan juga MGMP fisika dengan SK Diknas Daerah) belum dapat dilaksanakan dengan baik atau belum efektif dalam mendukung implementasi kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994.
 - e. Soal EBTA fisika SMU sebagai alat evaluasi belajar fisika tahap akhir dalam implementasi kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994, hanya berfungsi sebagai tes untuk kemampuan fisika pada ranah kognitif, dengan cakupan materi soal sesuai dengan cakupan materi GBPP fisika SMU 1994, mempunyai tingkat kesulitan soal menengah ke bawah, tetapi hasil implementasi masih menunjukkan bahwa pembelajaran fisika di SMU sangat rendah.
3. Rumusan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU, adalah:
- a. Pengembangan kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU harus dilaksanakan secara komprehensif atau menyeluruh dan serentak, walaupun secara sistem dapat bertahap.

- b. Karena pengembangan kebijakan harus secara menyeluruh dan serentak, maka model atau pola pengembangan kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi negara, dengan ini pengembangan panduan kurikulum model kurikulum berbasis kompetensi (KBK) untuk implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU dapat menjadi prioritas pemikiran.
- c. Pengembangan kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU harus berangkat dari kondisi rumusan dan implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika yang akan dikembangkan.

B. Implikasi

Studi implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU di Indonesia dalam pelaksanaannya telah memperoleh beberapa temuan tentang kekuatan dan kelemahan implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU produk 1994 ke belakang. Temuan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk analisis tentang produk penyempurnaan kurikulum, seperti: "Suplemen GBPP fisika SMU tahun 1999" dan "GBPP fisika SMU dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)", serta dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU dalam bentuk rekomendasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa.

1. Suplemen GBPP fisika SMU tahun 1999 menyempurnakan kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994 pada komponen materi, komponen ini hanya sebagian kecil dari kelemahan implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika SMU, dengan ini Suplemen GBPP fisika SMU belum dapat secara

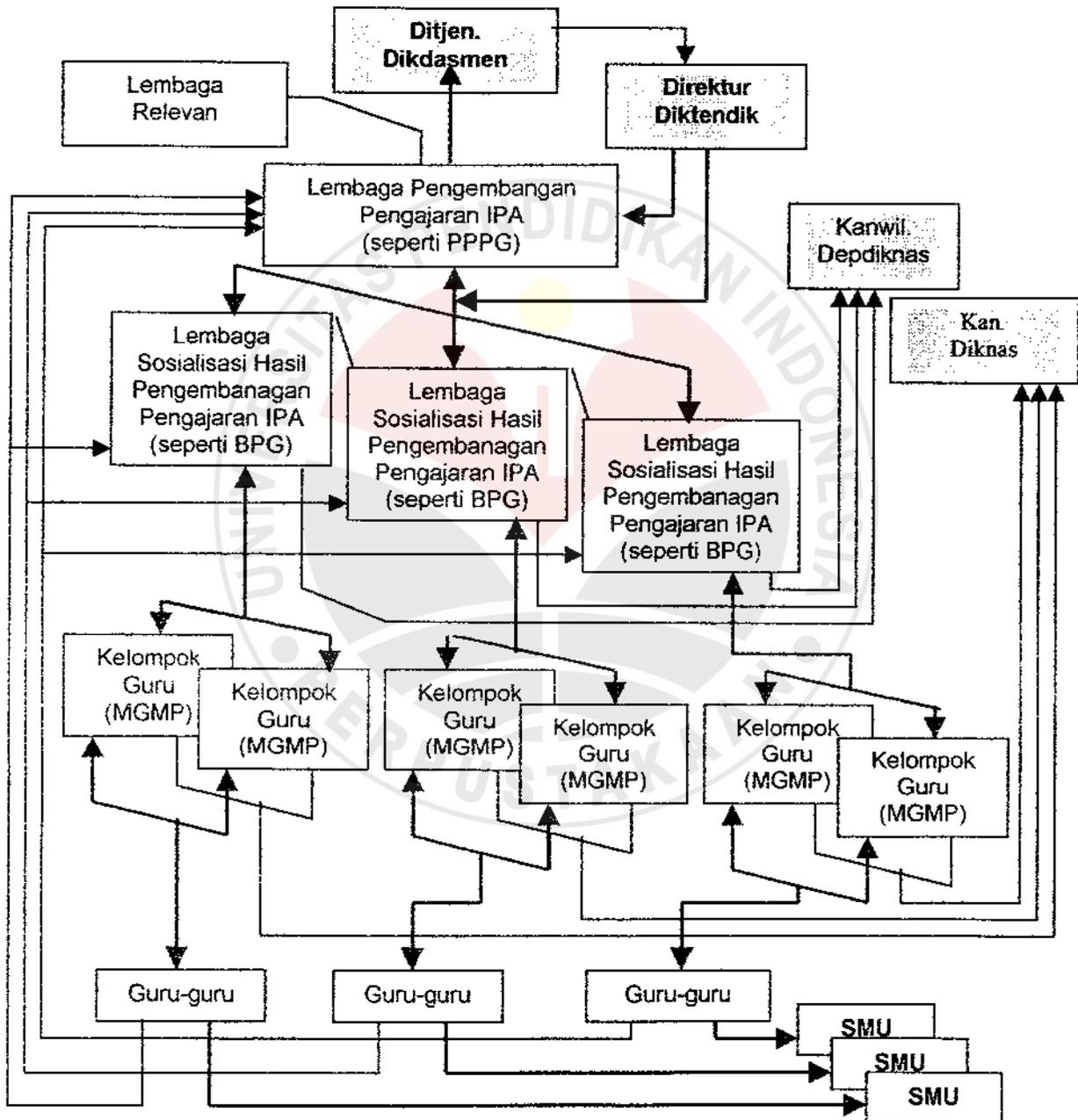
jelas memperbaiki hasil pendidikan IPA-fisika SMU, ditunjukkan dengan hasil pembelajaran fisika SMU masih tergolong sangat rendah.

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk mata pelajaran fisika SMU tahun 2001 terhadap kurikulum atau GBPP fisika SMU 1994 adalah suatu perubahan kurikulum, yaitu: dari kurikulum berbasis konten menjadi kurikulum berbasis kompetensi, dan dari kurikulum yang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya dirancang secara sentralistik (oleh pemerintah pusat) menjadi secara desentralistik (oleh pemerintah daerah) dengan tujuan agar pelaksanaan pendidikan fisika SMU lebih relevan dengan kondisi potensi sekolah di masing-masing daerah. Rumusan komponen GBPP fisika KBK SMU untuk komponen tujuan maupun komponen materi tidak sesuai dengan konsep KBK menurut Tuxworth, yaitu: KBK yang memuat kompetensi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. KBK SMU berkaitan dengan pembelajaran fisika, pengembangannya telah melalui uji-coba dan direncanakan untuk diimplementasikan mulai tahun ajaran 2004/2005, tetapi hingga akhir tahun 2002 persiapan sarana dan pembekalan untuk pendukung implementasinya belum ada. Bila hingga waktu implementasi KBK hal tersebut belum ada secara jelas, diduga pembelajaran fisika di SMU akan dilaksanakan seperti pembelajaran fisika sebelumnya, yang berarti KBK diduga tidak dapat memperbaiki hasil pembelajaran fisika di SMU.



C. Rekomendasi

Implementasi kebijakan pendidikan IPA-fisika perlu dilengkapi dengan sistem jaringan antar lembaga pendukung peningkatan mutu pendidikan IPA-fisika yang dapat saling kontrol dan bekerja sama. Alternatif sistem jaringan tersebut dibagankan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1: Bagan alternatif sistem jaringan antar lembaga untuk peningkatan mutu pendidikan IPA-fisika

Penjelasan Gambar 5.1

- (1) Lembaga pengembangan pengajaran IPA-fisika, seperti PPPG, bekerja sama dengan lembaga yang relevan, melaksanakan pengkajian dan pengembangan tentang pengajaran IPA-fisika sebagai bahan penataran untuk peningkatan pendidikan melalui penataran guru. Sosialisasi hasil pengembangan pengajaran IPA-fisika dilakukan oleh lembaga, seperti BPG. Lembaga pengembangan pengajaran IPA-fisika ini secara administrasi bertanggung jawab kepada Ditjen Dikdasmen, dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktur Diktendik;
- (2) Lembaga sosialisasi hasil pengembangan pengajaran IPA-fisika, seperti BPG, mensosialisasikan produk lembaga pengembangan pengajaran IPA-fisika melalui penataran guru anggota kelompok guru, seperti MGMP. Lembaga sosialisasi hasil pengembangan pengajaran IPA-fisika ini secara administrasi bertanggung jawab kepada Depdiknas Wilayah, dan secara teknis bertanggung jawab kepada lembaga pengembangan pengajaran IPA-fisika dan Direktur Diktendik;
- (3) Kelompok guru, dalam lembaga seperti MGMP, mensosialisasikan informasi tentang hasil pengembangan pengajaran IPA-fisika kepada para guru, dan memberikan masukan kepada lembaga-lembaga di atasnya tentang permasalahan pendidikan atau pengajaran yang dihadapi di sekolah. Kelompok ini secara administrasi bertanggung jawab kepada Diknas Daerah, dan secara teknis bertanggung jawab kepada lembaga sosialisasi hasil pengembangan pengajaran IPA-fisika;

- (4) Guru menerapkan hasil pengembangan pembelajaran di sekolah. Guru bertanggung jawab penuh tentang implementasi hasil pengembangan pengajaran IPA-fisika.

